

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Febry Priyono, d. (n.d.). *Hasil Survei Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren*.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hamdi. (2015). Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.
- Werdana, A. (2022). OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TERHADAP ASET DAERAH (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyyah) .
- Setyaningsih, P. (2022, November 15). *Penetapan Status Penggunaan BMN: Bagaimana Prosedurnya?* Retrieved from [djkn.kemenkeu.go.id: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/15619/Penetapan-Status-Penggunaan-BMN-Bagaimana-Prosedurnya.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/15619/Penetapan-Status-Penggunaan-BMN-Bagaimana-Prosedurnya.html)
- Kementerian Keuangan. (2003). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Kementerian Keuangan. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

- Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
- Kementerian Keuangan. (2017). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 793/KMK.01/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan .
- Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
- Kementerian Keuangan. (2020). Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2021). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.